



Bencana yang Terus Berulang: Saatnya Mengubah Paradigma Pembangunan Berbasis Risiko

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Posisi geografis pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dan kawasan *Pacific Ring of Fire* menjadikan Indonesia rentan terhadap bencana geologi, sementara perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan degradasi lingkungan meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi (World Bank, 2021; UNDRR, 2019). Data BNPB menunjukkan bahwa pada periode **1 Januari-13 Februari 2026** terjadi **342 kejadian bencana**, dengan **98,83% didominasi bencana hidrometeorologi** seperti banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Banjir menjadi kejadian terbanyak dengan 179 peristiwa, diikuti cuaca ekstrem (81), kebakaran hutan dan lahan (39), serta tanah longsor (33). Dampaknya mencapai **1,56 juta penduduk terdampak atau mengungsi**, 155 korban meninggal dunia, dan kerusakan ribuan rumah serta fasilitas publik (BNPB, 2026).

Paradoksnya, tingginya frekuensi dan dampak bencana tetap terjadi meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif kuat, mulai dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana hingga berbagai instrumen perencanaan tata ruang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa risiko bencana tetap tinggi ketika kapasitas penanggulangan bencana terus meningkat?

Ketahanan Semu di Tengah Tingginya Risiko

Tingginya risiko bencana di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Risiko muncul ketika bahaya (*hazard*) bertemu dengan paparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi (UNDRR, 2019). Salah satu penyebab utama adalah munculnya fenomena **ketahanan semu (*false resilience*)**, yaitu kondisi ketika masyarakat merasa mampu hidup berdampingan dengan bencana, padahal secara objektif tetap berada pada tingkat risiko yang tinggi.

Pertama, pengalaman menghadapi bencana berulang menciptakan **normalisasi risiko (*risk normalization*)**. Banjir musiman atau cuaca ekstrem yang sering terjadi tanpa dampak besar membuat masyarakat menganggap bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut

Slovic (1987), persepsi risiko lebih banyak ditentukan oleh pengalaman langsung dibandingkan probabilitas risiko yang sebenarnya.

Kedua, faktor ekonomi membuat masyarakat tetap tinggal di kawasan rawan. Bagi kelompok berpendapatan rendah, kedekatan dengan sumber mata pencaharian sering lebih penting daripada pertimbangan keselamatan jangka panjang. Relokasi tanpa dukungan ekonomi yang memadai terbukti sering gagal karena masyarakat kembali ke lokasi semula untuk mempertahankan penghidupan mereka (Novira et al., 2025).

Ketiga, keterikatan terhadap jaringan sosial dan pusat aktivitas ekonomi turut memperkuat paparan risiko. Kawasan pesisir, bantaran sungai, maupun pusat perdagangan informal sering kali menjadi lokasi yang tetap dipilih karena menyediakan akses pekerjaan, keluarga, dan layanan publik.

Keempat, keterbatasan akses terhadap lahan aman yang terjangkau menyebabkan masyarakat terdorong menempati kawasan rentan. Dalam konteks ini, risiko bencana bukan hanya persoalan alam, melainkan juga konsekuensi dari tata ruang, pasar lahan, dan pembangunan yang belum sepenuhnya berbasis risiko.

Paradoks Resiliensi Indonesia

Indonesia menunjukkan gejala **paradoks resiliensi**: kapasitas respons bencana meningkat, tetapi tingkat paparan risiko tidak berkurang secara signifikan. Pembangunan masih banyak berlangsung di kawasan rawan banjir, longsor, maupun pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut. Akibatnya, setiap peningkatan kapasitas tanggap darurat sering kali hanya mengurangi dampak sesaat tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan kebencanaan masih cenderung berorientasi pada penanganan pascabencana dibanding pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Padahal UNDRR (2023) menegaskan bahwa keputusan pembangunan yang mengabaikan risiko akan terus menciptakan risiko baru di masa depan.

Agenda Kebijakan: Dari Respons ke Pengurangan Risiko

Untuk memutus siklus bencana yang berulang, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan reaktif menuju pengurangan risiko yang lebih sistemik.

Pertama, memperkuat pendekatan preventif. Pengurangan risiko harus menjadi investasi pembangunan, bukan sekadar program penanggulangan bencana. Pemetaan risiko, sistem peringatan dini, dan pengendalian pembangunan di kawasan rawan perlu menjadi prioritas.

Kedua, mengintegrasikan risiko bencana dalam tata ruang dan perumahan. Peta risiko harus menjadi dasar utama penentuan zonasi pembangunan, RTRW, dan penyediaan perumahan bagi kelompok rentan. Pembangunan yang mengabaikan risiko hanya akan meningkatkan jumlah penduduk dan aset yang terekspos.

Ketiga, memperkuat dimensi sosial-ekonomi dalam kebijakan pengurangan risiko bencana. Relokasi tidak cukup hanya memindahkan penduduk dari zona bahaya, tetapi juga harus menjamin akses terhadap pekerjaan, layanan dasar, dan keberlanjutan mata pencaharian.

Keempat, meningkatkan literasi risiko masyarakat. Edukasi kebencanaan perlu berbasis pengalaman lokal, partisipatif, dan mudah dipahami agar mampu mengubah persepsi serta perilaku masyarakat dalam menghadapi risiko.

Penutup

Data BNPB tahun 2026 kembali menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam lingkaran risiko bencana yang tinggi. Tantangan utama bukan sekadar meningkatkan kapasitas respons, melainkan mengurangi paparan dan kerentanan yang menjadi akar persoalan.

Tanpa transformasi menuju pembangunan yang berbasis risiko, peningkatan kapasitas kebencanaan hanya akan menghasilkan ketahanan semu. Sebaliknya, integrasi pengurangan risiko ke dalam tata ruang, kebijakan sosial-ekonomi, dan perencanaan pembangunan akan membentuk ketahanan yang lebih substantif sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- BNPB. (2026). *Infografis Bencana Indonesia Tahun 2026*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- IPCC. (2012). *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation*. Cambridge University Press.
- Novira, et al. (2025). *Socio-economic Impact of the Relocation Policy of Mount Sinabung Victims*. GeoEco.
- Slovic, P. (1987). Perception of Risk. *Science*, 236(4799), 280-285.
- UNDRR. (2019). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction*. Geneva.
- UNDRR. (2023). *Disaster Risk and the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- World Bank. (2021). *Indonesia Country Disaster Risk Profile*. Washington, DC.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. Routledge.